
Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pembangunan Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat

Nurifa Irma Suryani¹⁾, Sri Rahayu²⁾

¹Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

²Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran partisipasi masyarakat dan perangkat desa dalam pembangunan Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif memerlukan sinergi antara partisipasi aktif masyarakat dan peran efektif perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa terhadap pembangunan desa. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, yang berjumlah 2326 Jiwa. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dari 100 responden. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa. Partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan, sangat penting untuk memastikan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Perangkat desa yang kompeten dan transparan dalam mengelola sumber daya desa juga menjadi faktor krusial dalam efektivitas pembangunan. Partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa adalah faktor penting dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dan perangkat desa, transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait untuk mencapai pembangunan desa yang lebih efektif dan merata.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat; Peran Perangkat Desa; Pembangunan Desa

ABSTRACT

This study examines the role of community participation and village officials in the development of Labuhan Kertasari Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency. Sustainable and inclusive village development requires synergy between active community participation and the effective role of village officials. This study aims to analyze the influence of community participation and the role of village officials on village development. A quantitative method was used in this research. The population in this study consists of all residents of Labuhan Kertasari Village, Taliwang District, West Sumbawa Regency, totaling 2,326 people. Primary data were collected through questionnaires from 100 respondents. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS). The results show that both community participation and the role of village officials have a positive and significant effect on village development. Active community involvement in every stage of development, from planning to supervision, is crucial to ensure that development aligns with local needs. Competent and transparent village officials in managing village resources are also key factors in the effectiveness of development. Community participation and the role of village officials are essential factors in sustainable and inclusive village development. The implications of this study highlight the need to improve the capacity of both the community and village officials, ensure transparency in village fund management, and foster good collaboration among all relevant stakeholders to achieve more effective and equitable village development.

Keywords: Community Participation; Role of Village Officials; Village Development

PENDAHULUAN

Fenomena perubahan iklim turut memengaruhi pembangunan desa. Banyak desa di Indonesia, terutama di wilayah pesisir dan pertanian, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sekitar 60% desa di Indonesia berada di daerah rawan bencana (KLHK, 2021). Dampaknya, produktivitas pertanian menurun, yang berimbas pada pendapatan masyarakat desa. Sebagai contoh, di Jawa Tengah, produksi padi menurun sebesar 15% pada tahun 2022 akibat kekeringan panjang (BPS, 2022). Pemerintah perlu memperkuat kebijakan yang mendukung peningkatan kualitas SDM, pengelolaan dana desa yang transparan, dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tanpa upaya yang terintegrasi, ketimpangan pembangunan antara desa dan kota akan semakin melebar, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.

Pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif membutuhkan sinergi antara partisipasi aktif masyarakat dan peran efektif perangkat desa, berdasarkan pada teori *Community-Based Development Theory* (Chambers, 2020) menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa bergantung pada keterlibatan langsung masyarakat sebagai subjek, bukan sekadar objek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan yang mulai dari perencanaan melalui Musrenbangdes, pelaksanaan melalui gotong royong, hingga pengawasan penggunaan dana desa akan menjamin bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa merupakan faktor kunci dalam menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih rendah dan menghadapi berbagai kendala. Menurut Romi (2019), partisipasi masyarakat di desa-desa di Jawa Tengah cenderung bersifat simbolis, di mana masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap perencanaan tanpa adanya keterlibatan aktif dalam pelaksanaan dan evaluasi program. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam proses pembangunan, serta lemahnya kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola partisipasi.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Roby dkk. (2024) di beberapa desa di Sumatera Barat. Mereka menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa seringkali hanya terbatas pada kehadiran dalam musyawarah desa tanpa disertai kontribusi pemikiran atau tindakan nyata. Menurut Jaa dkk. (2019), hal tersebut disebabkan oleh budaya paternalistik yang masih kuat, di mana masyarakat cenderung mengikuti keputusan pemimpin tanpa kritik atau masukan. Selain itu, kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses pembangunan, sehingga mereka enggan untuk berpartisipasi secara aktif.

Peran perangkat desa dalam pembangunan desa merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilan program pembangunan di tingkat lokal. Namun, fenomena yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa peran perangkat desa masih menghadapi berbagai masalah yang signifikan. Penelitian oleh Usman dan Yaya (2023) mengungkapkan bahwa rendahnya kapasitas dan kompetensi perangkat desa menjadi salah satu kendala utama. Studi yang dilakukan di beberapa desa di Jawa Tengah menemukan bahwa 60% perangkat desa tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang perencanaan dan penganggaran program pembangunan (Wibowo & Nugroho, 2020). Hal ini menyebabkan banyak program pembangunan tidak terlaksana secara optimal atau bahkan gagal mencapai target. Selain itu, kurangnya

pelatihan dan pendampingan dari pemerintah daerah juga memperparah kondisi ini, sehingga perangkat desa seringkali kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan.

Penelitian oleh Hidayat dan Yani (2020) menyebutkan bahwa perangkat desa seringkali terjebak dalam budaya paternalistik dan birokratis, di mana keputusan pembangunan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi kelembagaan desa yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, perangkat desa dapat menjadi aktor utama dalam mendorong pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Pembangunan Desa Labuhan Kertasari saat ini mengalami kemajuan yang pesat, terutama dalam bidang pengembangan pariwisata. Desa ini dikaruniai potensi alam yang luar biasa, mulai dari hamparan pasir putih yang memesona, terumbu karang yang masih alami, ombak yang cocok untuk selancar, hingga perpaduan unik antara pegunungan dan pesisir pantai. Kombinasi keindahan alam ini menjadi daya tarik utama yang banyak dicari oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun, meskipun memiliki modal alam yang melimpah, pengembangan pariwisata di Desa Labuhan Kertasari masih jauh dari optimal. Berbagai fenomena masalah yang kompleks menghambat percepatan pembangunan sektor pariwisata di desa ini. Seperti, infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan akses menuju lokasi wisata yang rusak atau fasilitas umum seperti toilet, tempat istirahat, dan pusat informasi yang masih terbatas, mengurangi kenyamanan pengunjung. Kemudian, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan pariwisata, seperti pemandu wisata atau pelaku usaha pariwisata yang profesional, menjadi kendala utama dalam meningkatkan kualitas layanan. Minimnya kesadaran masyarakat dan pengelola tentang pentingnya konservasi alam dapat mengancam kelestarian objek wisata itu sendiri. Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan investor swasta masih perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan pariwisata.

Dalam praktiknya, meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, masih terdapat pembangunan desa yang kurang tepat sasaran dan bahkan memicu konflik di tengah masyarakat. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam mekanisme implementasi kebijakan pembangunan desa, baik dari segi perencanaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan prioritas masyarakat, maupun dari aspek pelaksanaan dan pengawasan yang belum optimal.

Di sisi lain, perangkat Desa Labuhan Kertasari telah mendapatkan berbagai bentuk pembinaan dan peningkatan kapasitas, terutama dalam pengelolaan keuangan desa serta kegiatan diskusi kelompok terfokus (FGD) yang bertemakan pengembangan pariwisata. Program pembinaan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, serta didukung oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun demikian, implementasi hasil pembinaan tersebut masih belum optimal. Berdasarkan pengamatan peneliti, perangkat desa masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya permasalahan dalam administrasi keuangan desa, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan yang bersumber dari anggaran desa yang sering mengalami keterlambatan. Selain itu, pengajuan usulan pembangunan desa kepada pemerintah kabupaten terkadang belum selaras dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa. Kondisi ini berimplikasi pada efektivitas pembangunan desa serta pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Selain itu, keterbatasan latar belakang perangkat desa dalam bidang pariwisata menjadi salah satu kendala utama dalam perancangan dan implementasi program berbasis potensi lokal. Akibatnya, pengembangan sektor pariwisata di Desa Labuhan Kertasari belum tergarap secara optimal. Banyak potensi wisata, seperti kawasan pantai, yang masih belum dikelola dengan baik akibat kurangnya infrastruktur dan fasilitas pendukung. Pembangunan di desa ini juga kerap menghadapi tantangan dalam hal ketepatan sasaran dan transparansi pengelolaan. Minimnya sosialisasi mengenai penggunaan anggaran desa menyebabkan sebagian masyarakat kurang memahami bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif dalam pembangunan desa, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas perangkat desa serta optimalisasi partisipasi masyarakat agar pembangunan di Desa Labuhan Kertasari dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Masyarakat

Mansuri dan Rao (2022), partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai proses di mana individu, kelompok, dan komunitas terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan yang memengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari kontribusi tenaga, ide, hingga sumber daya finansial. Partisipasi masyarakat juga dipandang sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan bahwa program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Arnstein (2019) mengidentifikasi delapan tingkatan partisipasi masyarakat, yang dibagi menjadi tiga kategori utama: non-partisipasi, tingkat partisipasi simbolis, dan tingkat partisipasi warga negara yang sebenarnya. Tingkatan ini dimulai dari manipulasi (*manipulation*) dan terapi (*therapy*) yang termasuk dalam kategori non-partisipasi, di mana masyarakat hanya dijadikan alat untuk melegitimasi keputusan yang sudah dibuat oleh pihak berwenang. Tingkat partisipasi simbolis meliputi pemberian informasi (*informing*), konsultasi (*consultation*), dan penenangan (*placation*), di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, tetapi keputusan akhir tetap di tangan pihak berwenang. Tingkat partisipasi warga negara yang sebenarnya meliputi kemitraan (*partnership*), pendelegasian kekuasaan (*delegated power*), dan kontrol warga (*citizen control*), di mana masyarakat memiliki pengaruh signifikan atau bahkan kontrol penuh atas proses pembangunan.

Partisipasi masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk, tergantung pada konteks dan tujuan pembangunan. Menurut Hidayat dan Yani (2022), partisipasi masyarakat dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk utama yaitu, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam penerimaan manfaat, dan partisipasi dalam evaluasi. Diantaranya; (a) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, hal ini melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang program pembangunan. Misalnya, masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan; (b) Partisipasi dalam pelaksanaan, masyarakat terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan, seperti gotong royong membangun infrastruktur desa atau mengelola kegiatan ekonomi; (c) Partisipasi dalam penerimaan manfaat, masyarakat menikmati hasil dari program pembangunan, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur yang lebih baik dan (d) Partisipasi dalam evaluasi, masyarakat dilibatkan dalam

menilai keberhasilan atau kegagalan program pembangunan, serta memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan.

Partisipasi masyarakat memiliki banyak manfaat, baik bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi keberhasilan program pembangunan. Menurut Chambers (2020), partisipasi masyarakat dapat meningkatkan keberlanjutan program pembangunan karena program yang dirancang bersama masyarakat cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal (Chambers, 2020). Selain itu, partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan (*ownership*) terhadap program pembangunan, yang pada gilirannya mendorong masyarakat untuk lebih aktif menjaga dan memelihara hasil pembangunan.

Konsep Peran Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan elemen kunci dalam struktur pemerintahan desa yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan program pembangunan di tingkat local (Sari, 2021). Perangkat desa terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan beberapa perangkat lainnya seperti kepala urusan (KAUR), kepala seksi (KASI), dan kepala dusun. Peran perangkat desa dalam pembangunan desa dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi (Supriyanto, 2020). Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang peran-peran tersebut: (a) Perangkat desa memiliki peran penting dalam proses perencanaan pembangunan desa. Mereka bertugas untuk mengkoordinasikan musyawarah desa, di mana masyarakat dilibatkan dalam menentukan prioritas pembangunan. Perangkat desa yang efektif dapat memastikan bahwa proses perencanaan partisipatif berjalan dengan baik, sehingga program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat; (b) Perangkat desa bertugas untuk melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan. Ini termasuk mengelola sumber daya desa, seperti dana desa, untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Perangkat desa yang kompeten dapat memastikan bahwa program pembangunan dilaksanakan secara efisien dan tepat sasaran; (c) Perangkat desa juga memiliki peran penting dalam pengawasan dan akuntabilitas pembangunan desa. Mereka bertugas untuk memastikan bahwa program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan sumber; (d) Perangkat desa bertanggung jawab untuk mengevaluasi hasil program pembangunan dan melaporkannya kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Evaluasi ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan program, serta memberikan masukan untuk perbaikan di masa depan.

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui peningkatan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang ekonomi (Nasir, 2019). Pembangunan desa juga dipandang sebagai proses transformasi sosial dan ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan. Menurut Sari (2021), pembangunan desa harus berpusat pada masyarakat (*people-centered development*), di mana kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama (Chambers, 2020). Pembangunan desa merupakan proses multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, pemberdayaan lokal, dan keberlanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang konsep

pembangunan desa, dilengkapi dengan referensi dan sitasi yang relevan. Keberhasilan pembangunan desa dapat diukur melalui berbagai aspek yang mencerminkan kemajuan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di suatu wilayah. Menurut Mulyanto (2013), terdapat tiga indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan desa, yaitu sarana perekonomian, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan.

Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun berdasarkan grand teori *Community-Based Development Theory* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Teori ini berargumen bahwa keberhasilan pembangunan desa bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek, bukan hanya objek pembangunan. Dalam konteks Desa Labuhan Kertasari, partisipasi masyarakat yang optimal akan menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal, sementara perangkat desa berfungsi sebagai fasilitator yang memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Sementara itu, *Social Capital Theory* menyoroti pentingnya modal sosial (kepercayaan, jaringan kolaborasi, dan norma bersama) yang dibangun antara masyarakat dan perangkat desa untuk menciptakan sinergi pembangunan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarakan kepada masyarakat Desa Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Analisis data dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan inferensial, menggunakan teknik *Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Squares (PLS)*. Dengan menggunakan SEM-PLS, penelitian ini dapat mengidentifikasi seberapa besar kontribusi masing-masing variabel terhadap keberhasilan pembangunan desa, serta mengeksplorasi hubungan yang mungkin tidak terduga di antara variabel tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat dan optimalisasi peran perangkat desa guna menciptakan desa yang lebih maju dan sejahtera (Hair dkk., 2021).

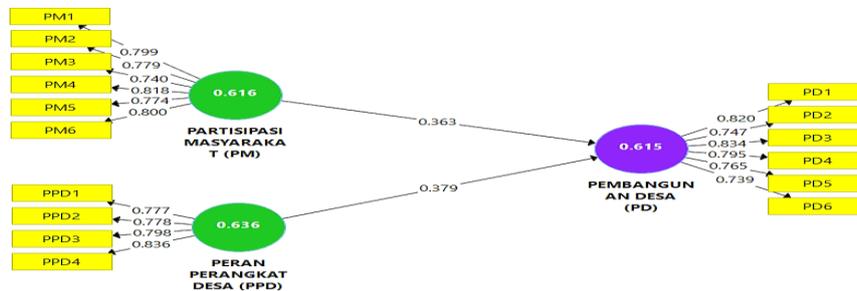
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui teknik pengumpulan data seperti kuesioner, data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen resmi desa, laporan keuangan desa, peraturan perundang-undangan, serta referensi dari jurnal akademik dan buku yang relevan. Data sekunder ini digunakan untuk memberikan konteks dan memperkuat analisis terhadap temuan yang diperoleh dari data primer. Evaluasi model struktural dalam PLS dilakukan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 3.2.9. Prosedur yang harus diikuti dalam PLS meliputi: (a) Evaluasi Model Pengukuran: Menilai validitas dan reliabilitas indikator yang membentuk konstruk; (b) Evaluasi Model Struktural: Menguji hubungan kausal antar konstruk; (c) *Uji Goodness of Fit*: Memastikan kecocokan model dengan data yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Kerangka *Structural Equation Modeling Partial Least Squares (SEM-PLS)*, outer model merupakan tahap awal dari proses analisis SEM-PLS. Tujuan utama outer model adalah untuk menilai hubungan antara konstruk atau variabel laten yang sedang dipelajari dan indikator kuantitatif yang sedang digunakan. Selain itu, selama tahap ini, evaluasi dilakukan untuk

menjamin bahwa indikator secara akurat mewakili konstruk yang dimaksud. Evaluasi ini mencakup pengujian validitas dan reliabilitas indikator (Hair, 2021).



Seluruh indikator pada konstruk partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan pembangunan desa memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel konstruk dalam model penelitian memenuhi kriteria validitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini bersifat valid. Pengujian untuk parameter selanjutnya yaitu nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang hasil atau outputnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Output Nilai AVE

Variabel Konstruk	AVE	Keterangan
Partisipasi Masyarakat (PM)	0.616	Valid
Peran Perangkat Desa (PPD)	0.636	Valid
Pembangunan Desa (PD)	0.615	Valid

Sumber: data primer diolah, 2025

Menunjukkan bahwa nilai AVE untuk konstruk partisipasi masyarakat, peran perangkat desa, dan pembangunan desa melebihi 0,50. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa semua variabel konstruk yang digunakan dalam model penelitian ini valid. Sebagian besar konstruk penelitian menunjukkan nilai reliabilitas melebihi 0,70. Temuan ini sejalan dengan hasil perhitungan *composite reliability* yang dilakukan sebelumnya. Penguatan lebih lanjut diperoleh melalui nilai *cronbach's alpha* yang seluruhnya berada di atas batas minimum 0,60. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa seluruh variabel penelitian memenuhi kriteria reliabilitas yang sangat baik, menunjukkan konsistensi internal yang tinggi dalam pengukuran, dapat dilihat pada berikut.

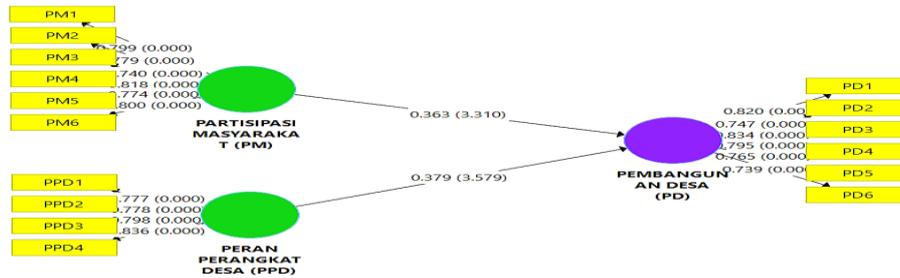
Tabel 2. Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel Konstruk	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>
Partisipasi Masyarakat (PM)	0.906	0.877
Peran Perangkat Desa (PPD)	0.875	0.810
Pembangunan Desa (PD)	0.905	0.875

Sumber: data primer diolah, 2025

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Inner model, atau model struktural, merupakan kerangka analitis yang memetakan hubungan kausal antar variabel laten dalam suatu penelitian (Hair et al., 2021). Evaluasi kekuatan pengaruh antar variabel laten dilakukan melalui analisis koefisien jalur (*path coefficients*) yang dihitung dengan metode *bootstrapping* untuk memastikan signifikansi statistik.



Uji R-Square, berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati 1 menandakan bahwa model tersebut sangat baik dalam menjelaskan data, sedangkan nilai mendekati 0 menunjukkan kemampuan penjelasan yang rendah (Hair *et al.*, 2021). Adapun dalam penelitian ini diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji R-Square

	<i>R-square</i>	<i>Adjusted R-square</i>
Pembangunan Desa (PD)	0.472	0.461

Sumber: data primer diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis *R-square* yang disajikan pada Tabel 4.6, variabel pembangunan desa (PD) memiliki nilai *R-Square* sebesar 0.472 dan *Adjusted R-square* sebesar 0.461. Hal ini menunjukkan bahwa 47,2% variasi dalam pembangunan Desa Labuhan Kertasari dapat dijelaskan oleh partisipasi masyarakat dan peran perangkat desa sebagai variabel prediktor dalam model penelitian ini. Sementara itu, sisanya (52,8%) dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti kebijakan pemerintah tingkat atas, kondisi geografis, atau variabel eksternal yang tidak diukur dalam penelitian ini. Selanjutnya, nilai *Adjusted R-square* yang relatif mendekati *R-square* (0.461 vs. 0.472) mengindikasikan bahwa model yang dibangun tidak mengalami overfitting dan memiliki stabilitas yang baik dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Dalam konteks penelitian sosial, nilai *R-square* sebesar 0.472 dapat dikategorikan sebagai kekuatan prediksi moderat, mengingat kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan desa.

Proses pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menguji validitas proposisi teoretis melalui analisis statistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi signifikansi empiris dari hubungan antar variabel yang diajukan dalam kerangka teoretis. Hasil pengujian hipotesis, yang mencakup analisis nilai statistik-t beserta tingkat signifikansi (nilai-p), secara komprehensif disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis (Bootstrapping)

Pengaruh Antar Variabel	Original Sampel	T-Statistik	P-Values
PM -> PD	0.363	3.310	0.000
PPD -> PD	0.379	3.579	0.000

Sumber: data primer diolah, 2025

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t-statistik sebesar 3,310, nilai p-value sebesar 0,000, dan original sample sebesar 0,363 untuk variabel konstruk partisipasi masyarakat

(PM). Oleh karena itu, hipotesis H1 diterima dan hipotesis H01 ditolak. Hal ini disebabkan karena nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 (kriteria signifikansi), nilai p-value lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi), dan original sample bertanda positif. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa di Labuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin aktif keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, maka akan semakin meningkat pula kualitas pembangunan desa yang dicapai.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai t-statistik sebesar 3,579, nilai p-value sebesar 0,000, dan original sample sebesar 0,379 untuk variabel konstruk peran perangkat desa (PPD). Dengan demikian, hipotesis H2 diterima dan hipotesis H02 ditolak. Hal ini disebabkan karena nilai t-statistik lebih besar dari 1,96, nilai p-value lebih kecil dari 0,05, dan original sample bertanda positif. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa peran perangkat desa mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan desa di Labuhan Kertasari. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja dan efektivitas perangkat desa dalam menjalankan tugasnya memberikan kontribusi penting dalam mendorong percepatan pembangunan desa.

Pada perencanaan pembangunan, masyarakat dilibatkan dalam kegiatan inventarisir kebutuhan riil masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa baik di tingkat RT, dusun maupun desa. Selain itu masyarakat juga dapat usulan pembangunan dapat melalui keterwakilan BPD masing-masing dusun. Selain itu, melalui musyawarah juga masyarakat dilibatkan dalam proses pengalokasian anggaran dan pembentukan panitia pelaksana pembangunan di desa. Masyarakat desa Labuhan Kertasari sudah menyadari pentingnya memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan yang bersumber dari anggaran desa. Pemeliharaan pembangunan harus dilakukan oleh semua masyarakat pemanfaat pembangunan dan dapat dilakukan secara gotong royong agar hasil pembangunan tersebut dapat berfungsi secara maksimal dan berkelanjutan. Pada pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh perangkat desa Labuhan Kertasari berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa labuhan kertasari sudah mampu merancang, melaksanakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan desa sehingga anggaran desa secara maksimal dapat digunakan untuk pembangunan desa demi kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil ini menguatkan *Community-Based Development Theory* (Chambers, 2020), yang menekankan bahwa pembangunan yang berorientasi pada masyarakat (community-driven) memiliki potensi lebih besar dalam menciptakan perubahan sosial-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Teori ini berpijak pada prinsip partisipatif, dimana masyarakat bukan sekadar objek, melainkan subjek aktif dalam menentukan arah pembangunan wilayahnya. Dalam konteks Desa Labuhan Kertasari, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan tidak hanya mendorong efisiensi implementasi program, tetapi juga memperkuat kapasitas sosial dan kelembagaan lokal. Dan menekankan bahwa pembangunan yang efektif dan berkelanjutan harus bersumber dari kekuatan lokal, dengan dukungan aktor-aktor kunci di tingkat komunitas, termasuk perangkat desa. Dalam konteks ini, perangkat desa tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga sebagai fasilitator, katalisator, dan motor penggerak partisipasi masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan perangkat desa dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program-program pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

SIMPULAN

Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akan semakin besar kontribusinya terhadap keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Partisipasi aktif mempercepat identifikasi kebutuhan riil, memperkuat rasa memiliki terhadap program pembangunan, serta mendorong terciptanya hasil pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Masyarakat yang terlibat secara intensif cenderung lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan program dan lebih mudah menyesuaikan program dengan perubahan yang terjadi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya akses ke pendidikan non-formal perlu diperhatikan untuk memastikan partisipasi masyarakat yang lebih optimal dan mandiri. Kemampuan perangkat desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat lokal secara optimal, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program pembangunan. Ketika perangkat desa mampu menyusun perencanaan yang matang, mengelola dana desa secara akuntabel, dan melaksanakan program pembangunan secara partisipatif, maka proses pembangunan desa berjalan lebih efektif dan hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnstein, S. R. (2019). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 85(1), 24-34.
- BPS. (2022). *Statistik Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Chambers, R. (2020). *Rural Development: Putting the Last First*. Routledge.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2021). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) (3rd ed.)*. Sage Publications.
- Hidayat, A., & Yani, S. Z. F. (2022). Peran Administrasi Pembangunan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 7091-7100.
- Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).
- KLHK. (2021). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2021*. Jakarta: KLHK.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2022). *Localizing Development: Does Participation Work?*. World Bank Publications.
- Mulyanto, (2013). *Indikator Dan Karakteristik Pembangunan Desa Sebagai Basis*
- Nasir, M. (2019). *Desa Mandiri: Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Alfabeta.
- Romi, AS, M. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(2), 26-33.
- Sari, R. (2021). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Medan: USU Press.
- Supriyanto, A. (2020). *Manajemen Pembangunan Desa: Teori dan Aplikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Usman, N. A., & Yaya, R. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(2), 100-108.
- Wibowo, A., & Nugroho, B. (2020). Kapasitas Perangkat Desa dalam Mengelola Program Pembangunan: Studi di Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 112-125.